



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

## KOTA TANGERANG SELATAN

Jln. Raya Puspipetek No. 1 Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan  
Telp. (021) 7562233 Fax. (021) 75883251

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 170/11/DPRD/2020

### TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah Menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021;
  - b. bahwa dalam rangka tertib hukum dan anggaran terhadap raperda yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 belum di bahas dan/atau belum selesai pembahasannya dimasukkan kembali ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2019).

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - b. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 180/3068/Huk, Tanggal 12 November 2020 Prihal: Penyampaian Hasil Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021;
  - c. Berita Acara Rapat Finalisasi Pembahasan Dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, hari Kamis Tanggal 19 November 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Judul rancangan peraturan daerah yang tertuang di dalam PROPEMPERDA sebagaimana diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 24 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,**

Ketua,



**Tembusan:**

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
2. Yth. Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan;
3. Yth. Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan;
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor : 170 /11/DPRD/2020

Tanggal : 14 November 2020

Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Landasan, Asas, Prinsip, Ruang Lingkup dan Pembinaan, Kegiatan Perkoperasian Usaha Mikro dan Menengah, Pengurus, larangan di Kota Tangerang Selatan	√	-	1. Undang Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 3. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2021	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Kerja Sama Daerah	Prinsip Kerja Sama Daerah, Subjek dan Objek dalam Kerja sama Daerah, kerja sama dengan lembaga negara, kementerian dan lembaga lainnya.	√		1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Daerah.	2021	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya di Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 2. PP. No. 19 Tahun 1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya.	2021	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Corporate Social Responsibility (CSR);	Program dan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), Ruang Lingkup, Badan Pengawas CSR, sanksi administrasi.	√	-	1. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas; 2. UU. No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	2021	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Rancangan Peraturan Daerah	Pembinaan dan Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan	Tata cara Pembinaan dan Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan	√	-	1. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; 2. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.	2021		DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Pembangunan Pembinaan Ketahanan Keluarga	Membangun karakter keluarga di Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	2021	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Perlindungan Produk Lokal	Jenis produk lokal asli Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.	2020	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Lanjutan 2020
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Hari Jadi DPRD Kota Tangerang Selatan	Penetapan hari jadi DPRD Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan; 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	2020	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Lanjutan 2020
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Parawisata Daerah	Pembangunan Keparawisataan daerah meliputi: destinasi parawisata daerah, pemasaran parawisata daerah, industri parawisata daerah dan keleribagaan keparawisata.	√	-	1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan.	2020	-	Dinas Parawisata		Baru



NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Rancangan Peraturan Daerah	Retribusi Daerah.	Pengaturan Ketentuan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu	√	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah;</li> <li>PP No. 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;</li> <li>PP No. 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin, perpanjangan tenaga asing.</li> </ol>	2020	-	Dinas Penan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Parawisata, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Sekretariat Daerah.		Luncuran 2017
11.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tata cara penyusunan RKA Perangkat Daerah	√		<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ol>	2020	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Luncuran 2020

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah	√	-	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.</p>	2020	-	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur		Luncuran 2020
13.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung	Penyesuaian tim ahli bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung	√	-	<p>1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Pemilik;</p> <p>2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.</p>	2020	-	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang		Luncuran 2020

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Rancangan Peraturan Daerah	Badan Usaha Milik Daerah Khusus Air Minum.	Pembentukan badan usaha milik daerah yang pengelolaan air minum	√	-	1. PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; 2. PP No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	2020	-	Dinas Bangunan dan Tata Ruang		Luncuran 2020
15.	Rancangan Peraturan Daerah	Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Pengerdaran Gelap Narkoba	Fasilitasi penyuluhan, pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika	√	-	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	2020	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Luncuran 2020
16.	Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, terbuka	Bentuk dan nilai penyertaan modal	√	-	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.	2020	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Luncuran 2020
17.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2020	pelaksanaan anggaran 2020	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Raperda Kumulatif Terbuka

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2. Pasal 16 Ayat (4) dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah.					
	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Ringkasan Perubahan APBD, Rincian Perubahan APBD, Rekapitulasi Perubahan Belanja, Daftar Jumlah Pegawai Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali serta daftar pinjaman daerah	√	-	1. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Raperda Kumulatif Terbuka
	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022	Ringkasan APBD, Rincian APBD, Rekapitulasi, Daftar Jumlah, Penyertaan Modal	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Pasal 16 Ayat (4) dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah.	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Raperda Kumulatif Terbuka

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN**

Ketua,

